

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Entitas Nonlaba

2.1.1 Definisi Entitas Nonlaba

ISAK 35 menjelaskan bahwa sumber daya yang entitas nonlaba peroleh untuk melaksanakan kebutuhan ekonominya dari para anggota dan masyarakat secara umum/sukarela. Dalam prosesnya tidak ada sebuah keharusan dari penyumbang ini untuk mendapatkan imbalan apapun dari entitas tersebut.

Perbedaan yang utama dari entitas nonlaba dengan entitas yang memiliki sifat komersial adalah pada cara entitas tersebut dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Menurut PSAK 1, entitas nonlaba merupakan sebuah entitas yang memenuhi sumber dayanya dari para donatur yang tidak mengharapkan sebuah imbalan yang dibayarkan kembali atau mengharapkan sebuah manfaat yang bernilai ekonomis yang sebanding dengan nilai yang telah diberikannya.

Menurut Purba dkk. (2021) entitas nonlaba merupakan entitas yang memiliki tujuan tidak untuk dikomersialisasi dalam rangka pencarian laba. Karena tidak digunakan untuk mencari laba, maka entitas harus menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitasnya.

2.1.2 Karakteristik Entitas Nonlaba

Karakteristik dari entitas nonlaba ini dijelaskan dalam ISAK 35, bahwa tidak adanya perbedaan yang jauh antara laporan keuangan entitas nonlaba dengan entitas bisnis lainnya. Perbedaan yang utama ada pada kepemilikan entitas, cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, dan tujuan dari bisnis tersebut.

Karakteristik dari entitas nonlaba sebagai berikut:

1. Sebuah entitas dapat dikatakan entitas nonlaba jika kepemilikannya tidak dapat dipindahtangankan, diperjualbelikan, maupun dibayar kembali. Pada saat pembubaran atau adanya likuidasi entitas, besaran kepemilikan tidak mencerminkan proporsi sumber daya entitas yang akan dibagi.
2. Entitas nonlaba mendapatkan sumber dayanya dari sumbangan anggota atau masyarakat secara umum. Para donatur tidak mengharapkan adanya imbal balik dari donasi yang diberikan.
3. Produk yang dihasilkan dari proses bisnis entitas nonlaba berupa barang/jasa, namun tidak menjadikan keuntungan atau profit sebagai tujuan utamanya. Jumlah pendapatan yang didapat tidak akan dibagikan kepada pendiri atau pemilik dari entitas yang berorientasi nonlaba tersebut.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Di dalam PSAK 1 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian secara terstruktur posisi dan kinerja keuangan dari sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

digunakan pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan entitas tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang sudah dipercayakan untuk dikelola.

Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi yang digunakan entitas bisnis untuk melaporkan kondisi terkait dengan kondisi keuangannya. Informasi ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut Septiana (2019) yang dimaksud dengan laporan keuangan merupakan informasi keuangan sebuah perusahaan di dalam satu periode tertentu dapat berupa bulanan, semester, atau tahunan yang berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan milik perusahaan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Di dalam PSAK 1 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian secara terstruktur posisi dan kinerja keuangan sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang digunakan pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan entitas tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang sudah dipercayakan untuk dikelola.

Tujuan laporan keuangan menurut Septiana (2019) yaitu bentuk penyajian informasi kepada pengguna laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan, hasil dari kinerja keuangan entitas bisnis, serta perubahan dari posisi keuangan entitas bisnis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan di dalam entitas tersebut.

2.3 Tujuan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Masjid sebagai entitas yang berorientasi nonlaba memiliki sebuah kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Purba dkk, 2021). Bentuk dari akuntabilitas yang dilakukan oleh masjid adalah dengan cara melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja pengurus atau takmir masjid. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dari kekuasaan pengurus masjid yang mengemban amanah mengelola sumber daya masjid untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan bentuk dari adanya transparansi yang dilakukan berupa keterbukaan dalam laporan keuangan masjid kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu jemaah, penyumbang, dan pihak pemerintah.

Di dalam ISAK 35 dijelaskan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan entitas nonlaba yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam memenuhi berbagai kepentingan donatur entitas nonlaba yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat kepada mereka, pemberi pinjaman atau memiliki piutang, dan berbagai macam pihak lainnya yang menyediakan sumber

daya yang digunakan entitas nonlaba. Tiap laporan keuangan memberikan informasi yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi. Dijelaskan secara rinci, bahwa tujuan laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan laporan keuangan yakni untuk menyajikan informasi terkait dengan:

1. Kuantitas dan karakter aset, liabilitas, dan aset neto entitas nonlaba;
2. Dampak dari transaksi dan keadaan lain yang menyebabkan perubahan nilai dan karakter aset neto;
3. Macam dan jumlah dari arus masuk dan keluar sumber daya dalam sebuah periode dan hubungan yang terjadi di dalamnya;
4. Cara entitas nonlaba dalam memperoleh dan mengeluarkan kas, mendapatkan dan menyelesaikan pinjaman, dan hal-hal lain yang mempengaruhi likuiditasnya;
5. Usaha jasa entitas nonlaba.

2.4 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Laporan keuangan entitas nonlaba harus disusun berdasarkan ISAK 35 yang isinya berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan selama satu periode akuntansi. Dalam bagian interpretasi pada ISAK 35 paragraf 10 dan 11 dijelaskan bahwa entitas nonlaba dapat menyesuaikan sendiri deskripsi isi yang digunakan dalam pos-pos tertentu di laporan keuangan maupun deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangannya sendiri.

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan dapat disebut juga sebagai neraca. Berdasarkan PSAK 1, laporan posisi keuangan merupakan salah satu jenis dari laporan keuangan yang memberikan informasi seputar posisi keuangan akhir periode suatu entitas dalam satu siklus pelaporan.

Laporan posisi keuangan perlu dibuat oleh entitas yang berorientasi nonlaba untuk menyediakan informasi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan aset neto, serta informasi mengenai hubungan antar unsur-unsur tersebut dalam sebuah periode pelaporan. Tujuan dari adanya laporan posisi keuangan ini adalah agar para pihak yang berkepentingan dapat menilai kemampuan ekonomi entitas berorientasi nonlaba dalam rangka pemberian jasa berkelanjutan. Selain itu juga dari adanya laporan posisi keuangan ini dapat diketahui pula mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan entitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber dayanya. Laporan posisi keuangan entitas nonlaba harus mencakup kondisi keuangan entitas berorientasi nonlaba yang terdiri dari aset, liabilitas, dan aset neto entitas berorientasi nonlaba. Contoh dari laporan posisi keuangan berdasarkan ISAK 35 dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.

Penyusunan laporan posisi keuangan entitas berorientasi nonlaba dilakukan dengan mengumpulkan aset dan liabilitas dengan kelompok yang sama atau homogen. Terkait dengan penyajian aset milik entitas, maka entitas diharuskan menyajikan ke dalam dua jenis sifat aset, yakni:

1. Aset Lancar, merupakan aset yang dimiliki oleh entitas yang memiliki sifat likuid atau mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan menjadi

uang. Biasanya aset lancar memiliki ciri khas berupa mudah diperjualbelikan, aset dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari sama dengan dua belas bulan, aset dapat diubah menjadi uang dengan cepat. Aset lancar memiliki fungsi untuk digunakan dalam rangka pembayaran segala macam kebutuhan entitas nonlaba dalam pemenuhan tugas dan fungsinya sehari-hari. Sebagai contoh yang termasuk ke dalam aset lancar adalah kas dan setara kas, piutang lancar, surat-surat berharga persediaan, dan lain-lain;

2. Aset Tidak Lancar, sesuai dengan penjelasan dari paragraf 02 PSAK 58 tentang Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, merupakan aset yang diharapkan memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan tersebut. Aset tidak lancar ini memiliki manfaat ekonomi yang diharapkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang Panjang. Jika masa manfaat aset tersebut setelah dilakukan depresiasi menjadi kurang dari sama dengan dua belas bulan maka harus dilakukan reklasifikasi menjadi kelompok aset lancar. Namun, aset tidak lancar yang direklasifikasi ini harus memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai dengan maksud untuk dilakukan penjualan Kembali. Hal ini dikarenakan aset tidak lancar diperoleh biasanya dengan maksud untuk dijual kembali. Contoh dari aset tidak lancar ini adalah peralatan, mesin, gedung dan bangunan, serta tanah.

Selain menyajikan aset, entitas juga harus menyajikan liabilitasnya di dalam laporan posisi keuangan. Di mana berdasarkan paragraf 10 PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dijelaskan bahwa definisi dari liabilitas adalah kewajiban bernilai ekonomis yang dimiliki oleh entitas pada masa kini. Liabilitas dapat muncul karena adanya peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dalam penyelesaiannya dapat menimbulkan arus keluar sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Contoh sederhana dari liabilitas ini adalah utang yang timbul karena pembelian aset masjid. Liabilitas dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang terjadi jika diperkirakan akan diselesaikan dalam satu periode pelaporan atau jatuh tempo kurang dari sama dengan dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca diterbitkan. Jika merujuk pada paragraf 69 PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, liabilitas akan diklasifikasikan oleh entitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila:
 - a. Liabilitas akan diselesaikan oleh entitas dalam siklus operasi normal;
 - b. Tujuan dari liabilitas ini adalah untuk diperjualbelikan;
 - c. Jatuh tempo dari liabilitas ini adalah dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - d. Entitas tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan;
2. Liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang timbul selain liabilitas jangka pendek.

Komponen terakhir pada laporan posisi keuangan atau neraca entitas berorientasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35 adalah aset neto. Seperti namanya, aset neto merupakan aset bersih atau neto sesuai dengan KBBI (2022) di mana neto berarti bersih atau isi sebenarnya. Di mana besaran nilai dari aset neto ini adalah hasil dari nilai aset dikurangkan dengan nilai liabilitas milik entitas. Di dalam laporan posisi keuangan, aset neto tersaji menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni:

1. Aset Neto Tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan merupakan aset neto yang dalam hal penggunaannya tidak memiliki pembatasan diperuntukkan untuk apa, dalam jangka waktu berapa lama, atau syarat-syarat lain yang mengikat dari pemberi sumber daya kepada entitas nonlaba ini. Akibat dari tidak adanya pembatasan oleh pemberi sumber daya, maka aset tersebut bebas digunakan untuk kepentingan entitas.

2. Aset Neto Dengan Pembatasan

Aset neto dengan pembatasan merupakan aset neto yang dalam penggunaannya memiliki pembatasan diperuntukkan untuk apa, dalam jangka waktu berapa lama, atau syarat-syarat lain yang mengikat dari pemberi sumber daya kepada entitas nonlaba. Aset neto dengan pembatasan terdiri dari penggabungan klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer seperti yang tertuang di dalam dasar kesimpulan (DK) paragraf 15 ISAK 35, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

2.4.2 Laporan Penghasilan Komprehensif

PSAK 1 memberikan penjelasan bahwa laporan penghasilan komprehensif berisi pos-pos penghasilan termasuk di dalamnya terdapat penyesuaian reklasifikasi yang tidak tercatat pada laporan laba rugi seperti yang diatur oleh SAK. Tujuan dari disusunnya laporan penghasilan komprehensif adalah untuk memberikan informasi mengenai rincian dari pendapatan yang diperoleh entitas, beban-beban yang terjadi selama periode tersebut, pendapatan dan beban di luar kegiatan bisnis entitas, operasi yang sudah dihentikan, dan beban komprehensif lainnya milik entitas. Di dalam prakteknya, laporan penghasilan komprehensif dibagi ke dalam dua bagian, yakni:

1. Penghasilan komprehensif lain yang akan dilakukan reklasifikasi ke dalam laporan laba rugi;
2. Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan dilakukan reklasifikasi ke laporan laba rugi. Reklasifikasi ini dilakukan ke dalam saldo laba.

Menurut Setiadi (2021), laporan penghasilan komprehensif merupakan laporan yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan jumlah surplus maupun defisit serta penghasilan komprehensif lain tanpa dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Di dalam laporan komprehensif tersedia informasi mengenai:

1. Pengaruh sebuah transaksi dan peristiwa lain yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah pendapatan;
2. Keterkaitan transaksi dan kejadian lain perihal jumlah beban;
3. Bagaimana sumber daya digunakan di dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan.

Informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi sebuah entitas minimal memuat:

1. Pendapatan;
2. Beban-beban keuangan;
3. Beban pajak;
4. Bagian dari laba atau rugi akibat aktivitas investasi dengan metode ekuitas atau pendapatan komprehensif;
5. Pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan komprehensif lain terdiri dari beberapa komponen yang dapat mencakup:

1. Segala perubahan yang terjadi dalam surplus akibat revaluasi untuk aset tetap dan aset yang tak berwujud;
2. Revaluasi dari program imbalan pasti. Di mana berdasarkan PSAK 24 paragraf 35 huruf b, imbalan pasti merupakan imbalan kerja yang sudah ditentukan berdasarkan lamanya bekerja dan entitas peserta tidak bisa keluar dari program tersebut tanpa membayar iuran atas imbalan yang akan diterima pekerja sampai dengan tanggal penarikan diri tersebut;
3. Segala keuntungan dan kerugian dari segala kegiatan usaha yang dilaksanakan di luar negeri;
4. Segala keuntungan maupun kerugian dari revaluasi aset keuangan dengan jenis tersedia untuk dijual atau *available for sale*;

5. Segala keuntungan maupun kerugian dari bagian efektif instrumen lindung nilai atau *hedging* yang dimaksudkan untuk melindungi nilai dari arus kas entitas.

Untuk memudahkan penggambaran dari laporan penghasilan komprehensif, maka disajikan contoh laporan penghasilan komprehensif sesuai dengan ISAK 35. Contoh laporan penghasilan komprehensif tersaji dalam lampiran 10 dan 11.

2.4.3 Laporan Perubahan Aset Neto

Di dalam melakukan penyusunan dari laporan perubahan aset neto yang sesuai menurut ISAK 35, laporan perubahan aset neto menyajikan informasi keuangan berupa aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya entitas dan aset neto yang memiliki pembatasan dari pemberi sumber daya entitas. Terkait dengan contoh laporan perubahan aset neto berdasarkan ISAK 35 dapat dilihat pada lampiran 12.

Laporan perubahan aset neto menurut Setiadi (2021) merupakan laporan yang memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kelas aset netonya.

2.4.4 Laporan Arus Kas

Dalam PSAK 2 tentang penyajian laporan arus kas, arus kas merupakan arus masuk dan keluarnya kas serta setara kas. Di mana kas ini terdiri dari saldo kas yang dimiliki entitas serta rekening giro entitas. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang dimiliki oleh entitas dengan sifat yang sangat likuid, memiliki jangka

waktu yang pendek, dapat dilakukan konversi menjadi kas dengan cepat, serta memiliki risiko perubahan nilai kecil yang dimiliki untuk digunakan memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Contoh dari laporan arus kas sesuai dengan yang ada dalam ISAK 35 dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung tersaji pada lampiran 13 dan 14.

Laporan arus kas memiliki fungsi menyediakan informasi tentang bagaimana kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta melakukan pengembangan model penilaian dan membandingkan antara nilai sekarang arus kas masa depan entitas. Selain itu laporan arus kas juga memberikan informasi untuk menilai mengenai bagaimana penggunaan kas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan kegiatan bisnis entitas.

Terkait hubungannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan agar dapat dilakukan evaluasi perubahan aset neto milik entitas, bagaimana likuiditas dan solvabilitas dari entitas tersebut, dan bagaimana kemampuannya dalam hal mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang dinamis. Terdapat tiga jenis aktivitas yang masuk di dalam laporan arus kas sesuai dengan paragraf 6, 13-17 PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, yakni:

1. Aktivitas operasi

Merupakan aktivitas utama dalam menghasilkan pendapatan dan selain aktivitas investasi serta pendanaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasi entitas, melakukan

pembayaran utang, dan melakukan investasi yang bermanfaat di masa depan. Umumnya arus kas ini berasal dari transaksi yang berasal dari laporan laba rugi. Aktivitas operasi ini dapat digunakan juga sebagai sebuah indikator utama penilaian kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas. Beberapa macam bentuk aktivitas operasi entitas adalah:

- a. Kas yang diterima dari adanya penjualan barang atau pemberian jasa dari aktivitas bisnis utama entitas;
- b. Kas yang diterima dari komisi atau pendapatan lain di luar aktivitas bisnis utama entitas;
- c. Pembayaran gaji atau upah secara kas kepada karyawan;
- d. Pembayaran secara kas untuk melakukan kontrak yang bertujuan untuk diperjualbelikan di kemudian hari.

2. Aktivitas investasi

Berisikan aktivitas yang dilakukan oleh entitas untuk memperoleh sumber daya yang akan diterima di masa depan. Aktivitas yang dapat digolongkan ke dalam aktivitas investasi hanya pengeluaran yang dapat memberikan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan. Segala perolehan dan pelepasan dari aset jangka panjang juga masuk ke dalam aktivitas investasi entitas. Oleh karena itu aktivitas investasi harus disajikan secara terpisah dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Beberapa macam bentuk dari aktivitas investasi yang dilakukan entitas adalah:

- a. Membayar secara kas perolehan aset yang memiliki jangka waktu panjang termasuk biaya pengembangan yang dilakukan kapitalisasi;

- b. Penerimaan kas akibat dari penjualan aset tetap milik entitas;
- c. Melakukan pembayaran secara kas dalam rangka perolehan instrumen utang yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan;
- d. Menerima kas hasil dari penjualan instrument utang milik entitas yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

3. Aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan penting untuk diungkapkan oleh sebuah entitas dikarenakan arus kas yang terkait dengan aktivitas pendanaan bermanfaat dalam memperkirakan klaim yang akan terjadi di masa depan oleh pemberi sumber daya entitas. Aktivitas pendanaan mengakibatkan adanya perubahan jumlah kepemilikan dan komposisi dari kontribusi masing-masing penyedia modal entitas terkait dengan ekuitas dan pinjaman milik entitas. Beberapa contoh terkait dengan arus kas yang timbul dari adanya aktivitas pendanaan ini adalah:

- a. Kas yang diterima dari adanya penerbitan instrumen ekuitas seperti saham;
- b. Kas yang diterima dari adanya penerbitan instrument liabilitas seperti obligasi;
- c. Melakukan pembayaran dalam rangka menyelesaikan pinjaman;
- d. Melakukan pembayaran secara kas kepada penyewa dalam rangka mengurangi saldo liabilitas terkait sewa.

2.4.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, informasi di dalamnya terkait satu dengan yang lainnya termasuk juga dengan adanya catatan-catatan penting terkait dengan transaksi atau saldo sebuah akun. Catatan atas laporan keuangan juga dapat berisikan mengenai kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh signifikan dan juga penjelasan-penjelasan lainnya.

Catatan-catatan tersebut termuat dalam catatan atas laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi tambahan yang wajib disediakan tentang perkiraan yang termuat dalam sebuah laporan keuangan. Selain itu catatan-catatan tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan entitas untuk dapat melakukan prediksi tentang arus kas yang akan terjadi di masa depan sebuah entitas dan tentu saja hal ini akan membantu pengguna laporan keuangan dalam menentukan kepastian dan waktu diperolehnya arus kas di masa depan itu. Contoh dari catatan atas laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 tersaji pada lampiran 15.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan evaluasi dari penerapan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sudah banyak dilakukan sebelumnya, termasuk juga dengan penelitian mengenai penerapan ISAK 35 tentang entitas nonlaba. Beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel II.1

Berdasarkan tabel II.1 terlihat bahwa secara umum obyek penelitian terdahulu yang merupakan entitas nonlaba belum menerapkan ISAK 35 maupun PSAK 45 (sebelum digantikan dengan ISAK 35).

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Simpulan
1	Muhammad Nizar Tri Kusuma	Perancangan Laporan Keuangan Masjid Ar Rahmah Banaran Berdasarkan PSAK 45 dan ISAK 35	Masjid Ar Rahmah Banaran belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 dan/atau ISAK 35 sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang laporan keuangannya
2	Anis Deviana Putri	Penyusunan Laporan Keuangan Masjid An Nur PJMI Berdasarkan ISAK 35	Masjid An Nur PJMI hanya membuat laporan keuangan sederhana sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35
3	Ashfiya Ahsani Mufliha	Tinjauan Atas Laporan Keuangan Entitas Nirlaba LKSA Al-Hikmah	Laporan keuangan LKSA AL-Hikmah masih sederhana karena hanya mencatat transaksi yang melibatkan kas saja sehingga laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45.
4	Marco Alfindo Milla Junior	Tinjauan atas Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Purwakarta	Gereja HKBP Purwakarta belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Gereja HKBP Purwakarta hanya menyajikan laporan pemasukan dan pengeluaran, laporan anggaran keuangan, dan laporan posisi kas mingguan saja.

Sumber: Diolah penulis dari KTTA Kusuma (2020), Putri (2020), Mufliha (2021), dan Junior (2021).